

Politik Representasi Aisyiyah dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Setyo Prihatin¹, Sulton², Ambiro Puji Asmaroini³ Prodi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Ponorogo, Indonesia
novitasetyo777@gmail.com¹, sulton@umpo.ac.id²,
ambiro@umpo.ac.id³

Abstract

This study examines the Politics of Representation in the Simultaneous Pilkada of Ponorogo Regency in 2020. The subject of this research is the Aisyiyah organization to reveal how the representation and control of Aisyiyah Politics in the simultaneous Pilkada in Ponorogo Regency in 2020. The primary data was obtained/sourced from the Aisyiyah administrators using the method of interviews while secondary data in the form of documents about Aisyiyah's activities were collected using the documentation method. The collected data is then processed and analyzed using the Huberman-Milles interactive analysis model. Based on this analysis, it was found that many organizations want the implementation of the 2020 simultaneous elections in the Ponorogo Regency to run healthily. One of the organizations that decided to actively participate was from the women's group, Aisyiyah. Aisyiyah's political representation has become resilient in the political field for women. Aisyiyah's embodiment is to strengthen the presence of women in the 2020 simultaneous elections in Ponorogo, namely by being a political representation and controlling the implementation of the 2020 simultaneous elections in depth.

Keywords: *Aisyiyah, Representation, Pilkada Simultaneously*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Politik Representasi Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. Subyek dari penelitian ini adalah organisasi Aisyiyah dengan tujuan mengungkap bagaimana keterwakilan dan control Politik Aisyiyah dalam pilkada serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. Data primer diperoleh/bersumber dari pengurus aisyiyah dengan menggunakan metode

wawancara sedangkan data sekunder berupa dokumen tentang aktivitas aisyiyah yang dihimpun dengan menggunakan metode dokumentasi. Data yang terhimpun kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisa interaktif model Huberman-Milles. Berdasarkan analisa tersebut diperoleh ada banyak organisasi yang menginginkan penyelenggaraan PILKADA serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo berjalan dengan sehat. Salah satu organisasi yang memutuskan untuk berpartisipasi aktif yakni dari kelompok perempuan, Aisyiyah. Politik representasi Aisyiyah menjadi ketahanan dalam bidang politik atas perempuan. Perwujudan Aisyiyah untuk menguatkan keberadaan perempuan dalam PILKADA serentak 2020 di Ponorogo yakni dengan menjadi representasi politik dan mengontrol jalannya penyelenggaraan PILKADA SERENTAK 2020 secara mendalam.

Kata Kunci: Aisyiyah, Representasi, Pilkada Serentak

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah/pemimpin secara terbuka merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi sebagai cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum di tingkat daerah. Sebagaimana juga dinyatakan Jimly Asshidiqie (2014) bahwa pemilu tidak hanya sebagai perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia melainkan juga untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Disamping itu pemilihan umum juga merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, karena pilkada serentak merupakan salah satu hak asasi warganegara yang amat prinsipil. Karena itu pemilihan umum merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban bagi suatu negara yang hendak mewujudkan ide kedaulatan rakyatnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. (Sulton, 2015:38).

Pada tahun 2020 Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yakni pemilihan umum kepala daerah secara serentak (baca: Pilkada Serentak). Pilkada menjadikan sarana sentral sebagai wujud eksistensi keterlibatan masyarakat turut serta dalam pembuatan keputusan politik di daerah (Arif, 2020:20). Disamping itu Pilkada serentak juga difungsikan sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi di tingkat local. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan

dari Pilkada serentak sebagaimana substansi di dalam Undang-Undang Pilkada antara lain untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang efisien dan efektif, untuk menghasilkan pemimpin yang memihak kepada kepentingan kemajuan daerahnya dan untuk membangun keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya serta proses politik agar tidak menciderai demokrasi itu sendiri.

Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020 ditengah pandemic covid-19 merupakan kesempatan emas bagi seluruh komponen masyarakat termasuk perempuan, terutama dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di tingkat daerah. Representasi perempuan diranah politik sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai kebijakan (Kambo, 2017: 2). Hak-hak politik warga sebagai jaminanya juga sudah dijelaskan bahwa perempuan menempatkan posisi yang sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan Pilkada, hak untuk dipilih dan memilih serta hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan (Nasution & Marwandianto, 2019: 163). Mengingat populasi perempuan sangat besar di Indonesia, keberadaannya potensial dan efektif untuk mengawasi jalannya pemilu sekaligus mitra bagi penyelenggara untuk pemilu yang lebih berkualitas dan partisipati.

Politik representasi perempuan dalam Pilkada diwujudkan melalui perjuangan keterlibatan aktif dalam memilih maupun dipilih menjadi salah satu calon demi keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun faktanya masih sering terjadi perempuan tidak banyak terlibat dan dilibatkan dalam politik. Bentuk ketidakadilan dan tidak kesetaraan inilah yang masih mengakar secara sistematis dalam jangka lama. Fenomena ini menandai betapa tidak mudah untuk membuka ruang kontestasi yang sama dengan kaum laki-laki. Diperlukan upaya untuk mendorong perempuan agar mampu maju berkontestasi dengan kapabilitas yang tinggi. Gerakan perempuan perlu diorientasikan memperkuat representasi politik non electoral untuk menghadirkan eksistensinya. Dimana dengan penguatan gerakan perempuan itu, diasumsikan dapat memaksa dan menuntut komitmen partai politik terhadap kepentingan perempuan penyelenggaraan Pilkada serentak. Upaya Gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politiknya dapat kita kaji melalui konsepsi teori politik kewargaan.

Politik kewargaan pada hakikatnya memberikan perhatian pada hubungan antara politik redistribusi, politik pengakuan, dan politik representasi. Tiga konteks ini berkaitan dengan empat dimensi kewargaan yaitu aspek legal, keanggotaan, hak, dan partisipasi. Dalam konteks politik representasi, arena politik merupakan sebuah situs kunci untuk perjuangan-perjuangan redistribusi, pengakuan, dan domain ketidakadilan politik. Fraser (2009) bahkan mengusulkan sebuah konseptualisasi tiga dimensi keadilan, dengan menambahkan misrepresentasi sebagai bentuk utama dari ketidakadilan politik dan politik representasi sebagai model ketiga dari perjuangan keadilan (Hiariej 2015).

Mendasarkan pada konsepsi teori tersebut, perempuan Indonesia terutama mereka yang memiliki komunitas seperti Organisasi Aisyiyah tidak lepas dari perjuangan untuk membebaskan kaumnya dari stigma kuno dan diskriminasi politik sebagaimana dimaksud. Mamin, dkk. (2019) mengutarakan Aisyiyah adalah mitra muhammadiyah untuk melaksanakan dakwah beserta pengabdian di tengah masyarakat. Termasuk berkaitan dengan perjuangan kesetaraan gender dimana perempuan memiliki control dan akses dalam pengambilan keputusan pada suatu organisasi dan memiliki kesempatan untuk memperoleh kedudukan pada struktur organisasi serta diberikan leluasa untuk masuk ke semua partai politik.

Aisyiyah telah berkontribusi dalam memajukan pergerakan perempuan Indonesia dalam segala aspek baik di bidang pendidikan, social, ekonomi hingga pendidikan politik (Fauzia 2004). Organisasi Aisyiyah semakin menegaskan arah yang pasti untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi anggotanya melalui pendidikan politik. Partisipasi melalui pendidikan politik dilakukan Aisyiyah agar anggotanya melakukan praktik politik yang sehat termasuk memberikan wawasan pengetahuan politik, sehingga diskusi politik bukan menjadi persoalan yang tabu dan awam lagi bagi perempuan.

Sejak era reformasi, secara prinsip Organisasi Aisyiyah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Pilkada dan menegaskan bahwa semua anggota Aisyiyah harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah dengan

kapabilitas yang sesuai dengan bangsa Indonesia dan tidak ada golput. Sementara itu Aisyiyah juga meminta kepada anggotanya untuk memperhatikan dan mengikuti perkembangan Pilkada serentak pada setiap periode serta dijadikan evaluasi oleh organisasi atas keterwakilan agenda Gerakan Aisyiyah di dalamnya. Organisasi Aisyiyah mengharapkan pimpinan yang terpilih sungguh-sungguh mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia bukan semata-mata hanya ada maksud tertentu. Dilansir detiknews.com

Sebagai organisasi perempuan dengan berbagai agenda atau programnya, tentu Aisyiyah berkepentingan atas terpilihnya pemimpin yang sejalan dengan aspirasi mereka. Sementara bagi penyelenggara, pengawas, partai pengusung, maupun pasangan calon akan melihat Organisasi Aisyiyah sebagai ormas perempuan yang strategis untuk berbagai agenda mereka masing-masing. Dalam konteks inilah relasi/interaksi antara Aisyiyah dengan stakeholders utama pilkada tersebut tidak terhindarkan. Permasalahan menariknya dalam konteks memperjuangkan kepentingan politik kaum perempuan yang selama ini terkooptasi oleh dominasi laki-laki adalah bagaimana perjuangan Aisyiyah dalam mendapatkan ruang partisipasi atau keterwakilan politik yang sama dengan kaum laki-laki dalam pilkada serentak tahun 2020 dan bagaimana control politik yang dilakukan oleh Aisyiyah atas penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.

Mengenahi permasalahan ini Alaudin, dkk (2020) mengatakan bahwa sesuai dengan data yang dilakukan Aisyiyah Surakarta juga memiliki peran aktif dalam dunia politik meskipun pernah mengalami kemacetan. Hal tersebut disebabkan karena masih terlalu sensitive bahasan politik dalam internal organisasi Aisyiyah. Namun tidak menutup kemungkinan di daerah Surakarta ternyata aisyiyah surakarta tergabung dalam relawan komisi pemilihan umum (KPU) pada penekanan angka golput di surakarta. Ada beberapa langkah yang dilakukan aisyiyah antara lain memberikan sosialisasi mengenai pendidikan politik terhadap anggotanya baik melalui penyuluhan maupun ketika ada majelis taklim yang rutin diselenggarakan termasuk dengan memberikan suatu himbauan supaya tidak banyak yang melakukan golongan putih (Golput). Hal ini dapat dikatakan bahwa wanita tersebut telah turut berpartisipasi langsung guna mewujudkan pemilu yang

sehat di surakarta. control politik yang dilakukan aisyiyah surakarta ini juga melakukan control politik seperti bekerja sama dengan KPU untuk melakukan controlling terhadap masyarakat surakarta yang akan melaksanakan pemilu.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian Kualitatif. Moleong 2009:5) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat meneliti sebuah keadaan objek alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang telah terjadi dengan cara melakukan pencarian data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat. Wawancara ini digunakan untuk sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti dapat melakukan studi pendahuluan agar menemukan suatu permasalahan yang akan diteliti. Tetapi apabila peneliti berkeinginan untuk mengetahui suatu hal dari responden lebih mendalam lagi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui apa yang terkandung dalam pemikiran dan dari hati responden, yaitu hal apapun yang tidak boleh diketahui dalam observasi. Peneliti dapat menjelaskan dalam pedoman wawancara supaya wawancara terarah dengan fokus penelitian. Mengenahi hal tersebut riset penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian diskriptif kualitatif. Dengan subyek penelitian tentang Organisasi Aisyiyah yang berjudul “Politik Representasi Aisyiyah dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020”. Dalam penelitian ini terdapat Informan dari penelitian ini adalah sebanyak tiga orang Informan pertama sebagai Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, informan Kedua sebagai Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Siman dan informan ketiga sebagai Anggota Aisyiyah. Data yang diperoleh dari informan melalui Teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model interaksi Huberman-Milles.

Hasil dan Pembahasan

Perjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan dalam konteks politik representasi akan memberikan makna yang penting bagi bangsa

dan Negara. Identitas kewargaan memberikan ruang untuk menguatkan atas hak-hak yang setara dengan kelompok lainnya. Bagaimana perempuan mengukung kelompoknya untuk diakui keberadaanya dan keterwakilan politik serta *control* politik terhadap PILKADA serentak merupakan permasalahan pokok yang diulas pada subab dibawah ini.

A. Organisasi Aisyiyah

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dimana juga memiliki organisasi Aisyiyah dan juga telah banyak sekali ranting yang tersebar di Ponorogo. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi social-keagamaan yang terbesar di Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 M oleh K.H Ahmad Dahlan. Berkaitan dengan gender, Aisyiyah merupakan mitra bagi Muhammadiyah untuk melakukan dakwah di masyarakat. Perempuan mempunyai akses dan control dalam pengambilan keputusan dan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan struktur organisasi. Aisyiyah merupakan organisasi otonom bagi perempuan muhammadiyah yang telah dilahirkan pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917 bertepatan dengan Isra' miraj Nabi Muhammad SAW. Aisyiyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran terhadap kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

Kemelut dunia politik membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Ketika itu semua gerakannya seakan-akan terhenti tidak bergerak sama sekali. Tahun 1950 Aisyiyah mulai bergerak lagi di bawah kepemimpinan Ibu Syamsudin sebagai Ketua dan Ibu Mardi Utomo sebagai Wakilnya. Tahun 1960 mampu mendirikan rumah bersalin Aisyiyah di Jl. Diponegoro atas prakarsa Muhammadiyah dan dibantu oleh Aisyiyah. Tahun 1955 Aisyiyah Ponorogo mendirikan Sekolah Kepandaian Putri (SKP). Pada tahun 1972 dibawah kepemimpinan ibu Syamsudin, Aisyiyah Ponorogo bersama dengan PKU Muhammadiyah mendirikan BKIA yang berada di Jl. Dr. Sutomo dan pengelolaannya diserahkan kepada ' Aisyiyah. Selain itu juga mendirikan cabang-cabang baru yang berjumlah 11 cabang. Tahun 1968 Aisyiyah bersama PKU

Muhammdiyah mendirikan asrama dan sekolah tuna netra (SLB A) yang bertempat di jl. Kawung, Kertosari Ponorogo. Serta pada tahun 1986 Asiyiyah menambah usaha lagi yaitu usaha toko yang diberi nama Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) di Jl. Hayam Wuruk, tepatnya di rumah ibu Suharto. MS, yang menampung keperluan Asiyiyah.

Lebih lanjut lagi menurut Amirulwati, M.Pd Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah siman saat ini menyampaikan bahwa kiprah Aisyiyah Ponorogo bukan hanya di bidang social, keagamaan, kesehatan maupun pendidikan melainkan Aisyiyah juga berpartisipasi aktif dalam aspek politik. Hanya saja kepentingan dakwah para ibu-ibu mengenai persamaan gender. Dimana seringkali perempuan hari ini pun masih dianggap lemah tidak memiliki peran dibidang politik. Aisyiyah bukanlah partai politik, tetapi Aisyiyah juga bisa menjadi bagian politik tetapi tidak secara langsung. Berdasarkan Berdirinya organisasi perjuangan kaum perempuan Aisyiyah memiliki wadah untuk mengedukasi masyarakat dalam memerangi kesetaraan, pengakuan, kesejahteraan serta perjuangan untuk politik representasinya.

B. Politik Keterwakilan Aisyiyah Dalam PILKADA SERENTAK 2020

Perjuangan Aisyiyah untuk mendorong kaum perempuan berpartisipasi aktif dalam mendapatkan ruang keterwakilan mereka serta mendapatkan keadilan, Hal ini akan dipaparkan menggunakan kerangka analisis politik kewargaan, melalui perjuangan atas representasi politik (Hiariej dkk, 2016:1) perjuangan Aisyiyah atas nasib kaum perempuan berfokus pada usaha untuk mendapatkan kuota keterwakilan secara politik serta control politik Aisyiyah atas urusan publik terutama yang berhubungan dengan eksistensi mereka, dan dalam memperjuangkan hubungan demokratis dengan pemerintah pada PILKADA serentak.

1. Keterwakilan Politik Aisyiyah Dalam Pilkada Serentak

Politik kewargaan dalam PILKADA serentak 2020 disini pengertiannya sama dengan upaya memotret dan mengkaji klaim tentang hak-hak kewargaan dan

partisipasi masyarakat serta kelompok-kelompok akar rumput dalam memperjuangkan aspirasi- preferensi politiknya selama proses pemilu secara bebas tanpa tekanan baik fisik maupun non-fisik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Aisyiyah turut serta dalam amal usaha kegiatan politik, keberlangsungannya menjadi organisasi social tidak membatasi Aisyiyah untuk berpartisipasi aktif, Aisyiyah memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi perwakilan perempuan di bidang politik.

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Niken Lestari M.Si, Ketua majlis Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Cabang Aisyiyah daerah Ponorogo yang telah bergabung dengan Aisyiyah selama 15 Tahun lamanya memberikan asumsi bahwa keberadaan perempuan menjadi bagian yang sangat penting dalam keterwakilannya. Saat ini perempuan terpilih di parlemen misalnya, masih belum sepenuhnya perempuan menjadi bagian dari perencanaan dan perumusan kebijakan public bahkan dalam praktiknya belum begitu terlihat eksistensinya. Ada dua hal yang melatarbelakangi keadaan tersebut. *Pertama*, kuota 30 % kursi yang diberikan kepada perempuan itu tidak serta-merta karena kualitas perempuan melainkan sekedar untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Keberadaan perempuan dalam PEMILU maupun PILKADA hanya sebagai bahan penyedap saja dari persyaratan untuk mengikuti pemilihan daerah. Maka dengan fakta yang bukan menjadi persoalan sukar lagi, dalam PILKADA 2020 tentu harus memiliki strategi untuk menghadapi dari berbagai pengaruh yang menimpa perempuan.

Strategi Aisyiyah dalam bidang politik pada PILKADA serentak 2020 ini membangun beberapa tindakan yang perlu dioptimalkan. *pertama*, Pendidikan Politik. Pengurus Aisyiyah dilakukan melalui silaturahmi bersama KPU untuk meluruskan pentingnya menjadi pemilih yang suportif dalam PILKADA serentak 2020. KPU memiliki harapan besar terhadap Aisyiyah Ponorogo untuk menjadi teladan bagi kaum perempuan serta ikutserta dalam kemajuan PILKADA 2020 dengan memberikan hak suara, sebagai pemilih haruslah menggunakan hak pilihnya dengan baik dan demi kemajuan Ponorogo pada lingkungannya. Dengan begitu GOLPUT tidak lagi menjadi persoalan lagi. Selanjutnya yang dilakukan Aisyiyah melalui berbagai program-program yang

dijalankan seperti majlis taklim rutin juga diselipkan berbagai wawasan dan pengetahuan menjelang PILKADA serentak 2020. Sehingga dengan diberikannya pendidikan politik kepada para anggota Aisyiyah, informasi dapat disebarluaskan untuk masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak positif dalam menghadapi dunia politik agar masing-masing dari anggota Aisyiyah maupun perempuan yang tidak tergabung dalam organisasi Aisyiyah memiliki kekuatan diri tanpa pengaruh dari orang lain dalam menghadapi dunia politik PILKADA serentak 2020. Dengan demikian, Aisyiyah juga menerapkan politik yang sehat dengan strategi turut menekan angka golput di Indonesia secara luas di daerah Ponorogo secara khususnya.

Kedua yaitu Akses dukungan, dalam menghadapi PILKADA serentak 2020 Aisyiyah telah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk terlibat aktif dalam TIM SUKES 1 maupun keduanya dan hal ini juga telah diterapkan oleh sebagian anggota Aisyiyah menjadi Tim sukses 1 maupun keduanya secara individual namun secara organisator Aisyiyah tetap dalam lingkup netral sebagai bentuk partisipasi aktif Aisyiyah dalam mensukseskan PILKADA Tahun 2020. Artinya, Ketika KAMPANYE telah berlangsung, Aisyiyah tidak dapat menerima siapa pun dari pasangan calon dalam bentuk apapun kecuali hanya untuk silaturahmi. Seandainya, ketika ada anggota Aisyiyah yang akan mencalonkan baik legislative maupun eksekutif, Aisyiyah akan turut mendukung penuh anggotanya. Tegas Niken Lestari M.Si (Wawancara, 10 Agustus 2021).

Lebih lanjut, salah satu anggota Aisyiyah bidang bagian bakat minat, Ikke Widya Kusumasari menyampaikan bahwa PILKADA serentak 2020 ini memberikan nuansa baru sehingga keterwakilan bagi kaum perempuan juga semakin gencar untuk memberikan penyuluhan mengenai politik, apalagi kepada mereka yang berusia muda atau awal sebagai calon pemilih dilingkup Aisyiyah. Mereka juga harus mendapatkan perhatian agar pengetahuan dan wawasan PILKADA serentak ini digunakan dengan sebaik mungkin dan menghindari adanya *money politics*. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendidik masyarakat untuk melek politik di masa Pilkada 2020 ini. Dengan demikian, dapat menghasilkan jebolan pemilih baru maupun yang lama menjadi masyarakat

yang berkualitas.

Ketiga, Strategi yang dilakukan seperti pengawalan dan menjalin kemitraan secara local memiliki dampak sebagai inisiatif kepekaan terhadap kapasitas perempuan dan kapabilitas perempuan serta keadilan gender. Praktiknya, mengajak orang sekitar atau lingkungan rumah per anggota Aisyiyah untuk sadar akan pentingnya politik yang sehat dan mengutamakan kepentingan masyarakat menjadi sangat penting. Dengan menanamkan nilai-nilai politik merupakan salah satu cara terbaik untuk menghadapi PILKADA serentak 2020.

Diperkuat kembali oleh Amirulwati, M.Pd ketua pimpinan cabang Aisyiyah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang sudah lama bergabung di dalam Aisyiyah, semenjak tahun 1980 sampai sekarang. PILKADA serentak 2020 memberikan tantangan baru bahwasanya keberhasilan pemilihan umum ini didasarkan pada pilihan kita sendiri sehingga diperlukan strategi untuk menjadikan warga masyarakat ikut terlibat aktif dengan jujur tanpa ada paksaan dari pihak-pihak manapun. Keempat, Strategi yang dilakukan menjelang berlangsungnya PILKADA serentak 2020 ialah penguatan kelompok dalam membangun networking. Hal ini di praktikkan melalui pengadaan seminar yang menjadi begitu penting. Penguatan dengan bentuk kerja sama antar anggota tingkat pusat, cabang maupun ranting merupakan pilihan sebagai organisasi perempuan menjadi power dalam bertindak sebagai preferensi perempuan dalam keterwakilannya.

Perjuangan-perjuangan inilah dalam aspek politik untuk mempertahankan politik representasi kaum perempuan terutama untuk Aisyiyah. Aisyiyah berusaha tampil di segala bidang aspek kehidupan untuk menunjukkan keterwakilan perempuan memiliki hak yang sama dalam PILKADA serentak 2020. Kehadiran Aisyiyah memberikan dampak positif bagi kaum perempuan untuk meneguhkan jati dirinya, bahwa Aisyiyah bersama semua perempuan dapat tampil di depan public karena kemampuan intelektual mereka bukan sekedar memenuhi kuota 30 % dalam parlemen. Dengan adanya Aisyiyah berpartisipasi aktif mendukung dan mendorong masyarakat melalui berbagai kegiatan dan programnya membantu mensukseskan PILKADA SERENTAK

2020 semata-mata untuk mewujudkan Negara yang demokrasi secara substansial.

2. Kontrol Politik Aisyiyah dalam Pilkada Serentak 2020

Perjuangan untuk mencapai keadilan gender dan mewujudkan politik representasi perempuan (yang bukan sekedar warna, tapi turut mewarnai) di negeri ini sepertinya masih butuh waktu panjang untuk dibuktikan, karena ia menyangkut kapabilitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan. Dalam lingkup PILKADA tahun 2020 ini untuk itu diperlukan suatu pengendalian. PILKADA serentak agar berjalan secara demokratis dari pemikiran Robert A Dahl yang memberikan ukuran-ukuran agar pemilu dikatakan memenuhi prinsip demokrasi salah satunya *final control of agenda*. Artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu.

Aisyiyah pun juga berusaha dengan sungguh-sungguh untuk ikutserta dalam pengendalian setiap kegiatan pesta rakyat termasuk Pemilukada serentak pada tahun 2020 kemarin. Dalam pemikiran Niken Lestari M.Si (Wawancara, 11 Agustus 2021) mengatakan bahwa ada beberapa usaha-usaha Aisyiyah dalam mengontrol penyelenggaraan PEMILUKADA serentak ini antara lain ketika ada calon yang ingin berkampanye kepada Aisyiyah maka Aisyiyah berusaha untuk memberikan arahan bahwasanya Aisyiyah bukan tidak menerima setiap calon melainkan Aisyiyah berusaha untuk netral berdasarkan visi- misi yang telah disosialisasikan. Aisyiyah menjunjung tinggi Pancasila menjaga solidaritas dan mendukung semua calon secara umum. Selain itu, usaha Aisyiyah yaitu memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi dan melihat profil sejarah masing masing calon. Hal lain ketika jauh sebelum pemilihan berlangsung.

Aisyiyah juga melakukan *survey* untuk membidik siapa pemimpin yang benar benar mementingkan kepentingan rakyat. Dengan usaha inilah Aisyiyah dapat mengontrol setiap pergerakan dunia politik dalam melihat panasnya pemilukada serentak 2020. Penambahan dari Ikee widiyaning, usaha dalam agenda

control politik sebenarnya setiap hari selalu dilakukan, itupun dilakukan jauh jauh hari, tujuannya untuk mendapatkan informasi penting lebih mendalam. Ini merupakan usaha untuk mengendalikan pergerakan Pemilu serentak 2020. Aisyiyah terlihat diam namun juga memantau dan mendukung terciptanya Pemilu serentak 2020 yang sehat dan baik.

Diperkuat oleh Amirulwati, M.Pd bahwa usaha yang dilakukan oleh Aisyiyah yaitu selalu mengikuti perkembangan PILKADA serentak 2020 melalui radio gema surya milik Muhammadiyah, serta usahanya mencari tahu siapa saja yang terdaftar menjadi timsukses baik itu ditingkat ranting maupun cabang. Jika ada salah satu atau banyak dari anggota Aisyiyah yang bisa menjadi calon, pemantauan keadaan Negara mungkin akan lebih leluasa guna mewujudkan politik representasi yang baik (wawancara, 10 Agustus 2021).

Hal inilah yang menjadikan perjuangan Aisyiyah untuk mempertahankan pilkada serentak 2020 yang sehat dan mewujudkan politik representasi yang seharusnya. Perjuangan demi perjuangan akan dilakukan agar mendapatkan kesejahteraan dan menjadi Negara demokratis yang substansial secara utuh.

Simpulan

Perjuangan Aisyiyah berpartisipasi aktif untuk mendapatkan ruang keterwakilan perempuan yang diorientasikan dalam analisis politik kewargaan melalui perjuangan atas politik representasinya (Hiariej dkk, 2016:1) perjuangan Aisyiyah atas nasib kaum perempuan berfokus pada usaha untuk mendapatkan kuota keterwakilan secara politik serta control politik Aisyiyah atas urusan publik terutama yang berhubungan dengan eksistensi mereka, dan dalam memperjuangkan hubungan demokratis dengan pemerintah pada PILKADA serentak 2020.

Keterwakilan Aisyiyah ini dilakukan melalui berbagai cara meskipun tidak terjun secara langsung dalam bidang politik. Aisyiyah pun ikut melibatkan diri untuk aktif dalam PILKADA serentak 2020 ini. Politik representasi Aisyiyah selalu memberikan strategi untuk mensukseskan pesta demokrasi ini antara lain

sebagai berikut: 1. Aisyiyah berusaha memberikan pendidikan politik terhadap anggotanya khususnya, dan masyarakat secara umumnya agar menghadapi PILKADA serentak dalam memilih pasangan calon berfikir kritis serta tidak terperangkap dalam *money politic*. Selanjutnya ke-2 Aisyiyah dengan akses dukungan. Aisyiyah juga berperan untuk bersikap netral dan membangun silaturahmi kepada semua calon pasangan tanpa ada paksaan. Ketiga, pengawasan dan menjalin kemitraan secara *local*, Aisyiyah berperan untuk mengajak anggotanya dari pusat, cabang dan ranting bebas memilih namun dengan kapabilitas yang tinggi disaat calon pasangan selama kampanye maupun disaat PILKADA berlangsung. Hal ini pun sebagai bagian gerakan Aisyiyah dalam politik representasi dalam mensukseskan PILKADA serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo.

Referensi

Fauzia, Amelia. 2004. *Tentang Perempuan Islam: Wacana Dan Gerakan*. Gramedia Pustaka Utama.

Hiariej, E. 2015. "Post Clientelism in Indonesia."

Buku Pol_sQkZTW. Kewargaan di Indonesia. (n.d.).

Alauddin, M. A., Asyifani, K., Herlina, H., & Putri, M. A. P. (2020). 'Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019. DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi, 9(2), 105–114.

Fauzia, A. (2004). *Tentang perempuan Islam: Wacana dan gerakan*. Gramedia Pustaka Utama.

Hiariej, E. (2015). *Post Clientelism in Indonesia*. Yogyakarta: PCD Press. ISSN

Hiariej, Eric. (2018). Politik kewargaan di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Saputra, H. A., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 12(1), 89–110.

Stokke, K., & Törnquist, O. (2013). *Democratization in the Global South: The importance of transformative politics*. Springer.

Sulton. (2015). *Pemilu dan Kepemimpinan Nasional*. Wade Group

Stokke, K., & Törnquist, O. (2013). *Democratization in the Global South: The importance of transformative politics*. Springer.

Jajeli, R. (2018). Aisyiyah Minta Anggotanya Tidak Golput di Pilkada. In *DetikNews*.

Kambo, G. A. (2017). Penguatan Identitas Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Magister Ilmu Politik, Universitas Hasanudin*, Vol.3 No.1, 1–16.

Lexi, J., & M.A., M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian*

Muhammad Alif Alaudin, Khalis Asyifani, Herlina, M. A. P. P. (2021). *Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019*.

Sulton. (2015). *Pemilu dan Kepemimpinan Nasional*,.

Aisyiyah, “ Sejarah Aisyiyah Ponorogo”, <https://www.rsuaisyiyahponorogo.com> diakses tanggal 5 Agustus 2021